

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pertama, pada penelitian yang berjudul “Tata Kelola Pariwisata Bencana Dalam Perspektif Collaborative Governance Studi Pariwisata Bencana Volcano Tour Merapi Di Kabupaten Sleman” menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya, dengan jenis penelitian deskriptif untuk menguraikan sejumlah peristiwa yang bervariasi. Hasil penelitian ini menunjukkan partisipasi aktor non-pemerintah dalam urusan administrasi disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki masing-masing. Intensitas hubungan antara para pemangku kepentingan sebagian besar masih berada pada tingkat sedang. Terjadi transformasi dalam bentuk kolaborasi, dari struktur perintah yang hierarkis menuju pada bentuk jalinan dan kerjasama. Manajemen pariwisata-bencana yang dilaksanakan dengan pendekatan transformasional dan terorganisir, dimulai dari penyusunan visi bersama, partisipasi, pembangunan jaringan, dan kemitraan, mampu membentuk pariwisata-bencana yang berkelanjutan. Dalam konteks tata kelola kolaboratif, memberikan kewenangan penuh kepada Tim Pengelola dianggap sebagai opsi terkemuka untuk memastikan kelangsungan pengelolaan pariwisata-bencana. (Zaenuri, 2016)

Kedua, dalam penelitian yang berjudul “Pemetaan Tata kelola Pengembangan Pariwisata Mapping The Tourism Development Governance” metode gabungan (kualitatif-kuantitatif) diterapkan. Random sampling proporsional stratified digunakan sebagai teknik pengambilan sampel, dan data dikumpulkan melalui kuesioner. Penelitian ini melibatkan 25 anggota Badan Pengelola Kawasan Geopark Pongkor. Memperoleh hasil temuan yaitu dampak observasi menyatakan maka pengelolaan peningkatan pariwisata Geopark Pongkor menerima penilaian yang positif. Menurut evaluasi SWOT, ada banyak potensi untuk pengembangan karena sumber daya geologi yang luar biasa, dukungan lintas sektor, dan kehadiran pakar terkemuka. Status wilayah yang terdefinisi dengan baik, kerjasama yang erat antara pihak-pihak pengelola, dan keberadaan warisan sejarah yang beragam. Namun, aspek kelemahan terkait dengan koordinasi

pengelolaan, ketidakjelasan regulasi pengelolaan, kebutuhan peningkatan aksesibilitas jalan dan infrastruktur pendukung, serta rendahnya pendapatan dari sektor pariwisata. Walaupun begitu, peluang yang dapat diperoleh adalah tingginya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan. Dari sudut pandang lain, potensi ancaman yang mungkin timbul adalah risiko bencana di kawasan Pongkor (Ridwanullah et al., 2021)

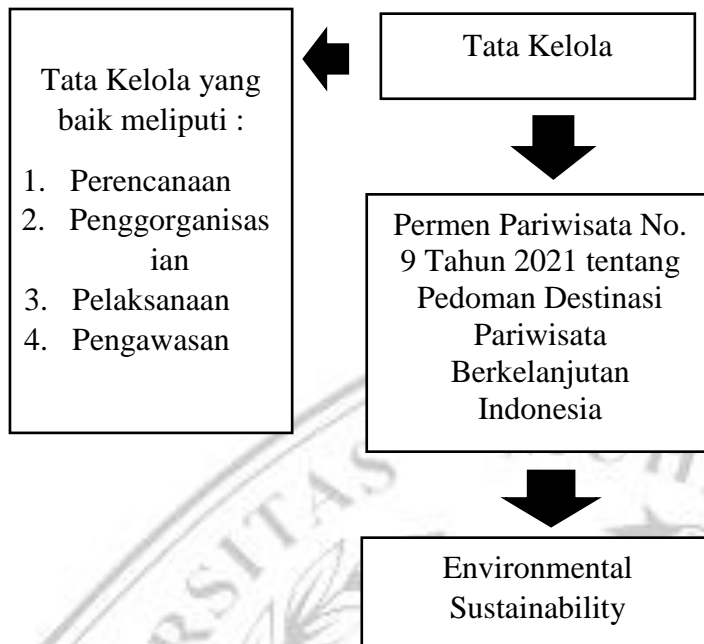
Ketiga, dalam penelitian yang berjudul “Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance) Pembangunan Pariwisata Bajo Mola Wakatobi” melakukan penyelidikan dengan maksud untuk menjelaskan cara kolaborasi dalam pengembangan pariwisata Bajo Mola Wakatobi yang melibatkan beragam pihak dari sektor publik dan swasta. Dengan pendekatan penelitian kualitatif yang mencakup wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Data penelitian menunjukkan bahwa implementasi tata kelola kolaboratif dalam pengembangan pariwisata Bajo Mola Wakatobi berjalan lancar, dengan partisipasi luas dari sejumlah pemangku kepentingan, termasuk British Council, Bank Mandiri, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi, serta komunitas lokal dan Lembaga Pengelola Wisata Bajo Mola. Langkah awal dilakukan dengan interaksi langsung dan pembangunan hubungan kepercayaan antara semua pihak terlibat, yang pada akhirnya meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola pariwisata, manajemen limbah, dan juga peningkatan pendapatan bagi komunitas Desa Bajo Mola Wakatobi. (Sudirman et al., 2022)

Keempat, dalam penelitian yang berjudul “Tata Kelola Ekowisata Berbasis Ergonomi dan Kearifan Lokal di Wisata Pulau Oksigen Gili Iyang” penelitian ini bertujuan untuk memahami upaya eksplorasi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan bersama masyarakat lokal tentang pentingnya pengelolaan ekowisata yang memperhatikan prinsip-prinsip ergonomis serta produk domestik pada Pulau Oksigen Gili Iyang. Dengan melakukan penelitian aksi kepada warga lokal, anggota Kelompok Sadar Wisata, dan anggota Gerakan Pemuda Sejahtera. Wisata alam dan keunggulan domestik Pulau Oksigen Gili Iyang menawarkan banyak peluang untuk pengembangan, menurut temuan penelitian. Oleh sebab itu, butuh diberikan afeksi distingtif atas pengelolaan ekowisata yang ergonomis dan menghargai kearifan lokal sebagai langkah pencegahan risiko dan penjaminan keselamatan lingkungan

serta wisatawan. Setelah melakukan refleksi, beberapa rencana pengelolaan ekowisata yang berorientasi pada ergonomi serta produk domestik pada Pulau Oksigen Gili Iyang, Madura, terungkap oleh peneliti. Disarankan kepada pengelola Pulau Oksigen Gili Iyang untuk memperkuat citra mereknya sebagai destinasi ekowisata yang menghormati kearifan lokal. Hal ini bertujuan agar ekowisata yang berorientasi pada ergonomi dan bergantung pada kearifan lokal di Pulau Gili semakin dikenal dan diminati (Izzuddin & Ilahiyah, 2022)

Kelima, dalam penelitian yang berjudul "Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Sula" hasil dari studi menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dalam pengembangan pariwisata telah dijalankan, dengan pengalokasian dana di setiap lembaga terkait. Meskipun demikian, tantangan terkait sumber daya manusia dan aspek teknis terutama dalam perbaikan infrastruktur masih dihadapi, khususnya di Dinas Pariwisata. Kontribusi dari setiap pemangku kepentingan pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sula tercermin dari peran yang mereka mainkan dalam usaha tersebut. Sejumlah pihak yang terlibat pada pengembangan sektor pariwisata termasuk Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula, para usahawan pariwisata, tokoh-tokoh masyarakat, serta masyarakat umum (Kedasi Silayar, Ika Sartika, 2021)

2.2 Kerangka Teori



Gambar 2.1 Kerangka Teori

Sumber : Diolah oleh Peneliti

2.2.1 Tata Kelola (Governance)

Tata kelola (governance) adalah suatu proses atau sistem penyelenggaraan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif yang mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau negara melibatkan kerjasama lintas sektor, termasuk sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil. Governance merupakan sebuah kerangka interaksi di mana proses politik, ekonomi, dan administratif berlangsung dengan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan melibatkan partisipasi dari seluruh aktor dan pemangku kepentingan (Kirana & Artisa, 2020).

Fungsi pengelolaan mengacu pada serangkaian fungsi yang ada dalam proses menuju pencapaian tujuan suatu organisasi, lembaga, atau kegiatan tertentu, seperti manajemen birokrasi pemerintahan, korporasi, dan pengelolaan lingkungan ditinjau dengan cermat, dan sebagainya, yang telah ditentukan sebelumnya, dengan menggunakan berbagai sumber daya yang ada, seperti SDA. Ada 4 fungsi utama dalam pengelolaan menurut (Yuliani & Hermawandi, 2007) yaitu:

1. Planning (perencanaan)

Penyusunan rencana melibatkan langkah-langkah seperti menetapkan tujuan, prosedur, target, dan pemilihan opsi terbaik. Ini dilakukan dengan menganalisis fakta-fakta, membuat hipotesis bagi masa depan, dan mendeskripsikan hal yang dibutuhkan demi tercapainya hasil yang diinginkan, sesuai dengan konsep yang diajukan oleh George R. Terry. (dalam Susita et al., 2023)

Perencanaan operasional terdiri dari :

- a) Perencanaan infrastruktur: pembangunan fasilitas yang mendukung kegiatan kerja..
- b) Perencanaan strategis: pengaturan dan pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan organisasi.
- c) Perencanaan operasional: penyusunan rencana untuk mengatur kegiatan sehari-hari dalam operasi perusahaan.

2. Organizing (Pengorganisasian)

Proses pengorganisasian melibatkan langkah-langkah seperti pengelompokan, pembentukan tim, penentuan tugas dan tanggung jawab, pembagian kerja, pengaturan kegiatan, alokasi personil, penyediaan fasilitas, dan delegasi wewenang. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan interpersonal yang efektif di dalam organisasi, memastikan kerja sama dalam tim, dan memenuhi kepuasan kerja individu. Dengan menempatkan individu yang sesuai dalam struktur organisasi, aktivitas organisasi dapat berjalan lancar. Pemimpin perlu mampu mengenali potensi SDM yang berkualitas dan memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk menjalankan fungsi organisasi dengan baik. Menurut George R. Terry (dalam Susita et al., 2023) mengemukakan mengenai dasar organisasi, yaitu :

- a) Misi
- b) Pembagian kerja
- c) Penugasan pegawai
- d) Wewenang dan tanggung jawab
- e) Pemberian kekuasaan
- f) Rentangan kekuasaan
- g) Sistem

3. Pelaksanaan (Actuating)

Mengarahkan, menggerakkan, dan memimpin anggota organisasi atau staf untuk bekerja secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan organisasi merupakan tugas yang penting. Actuating, sebagai pelaksanaan atau pendorong, menggerakkan semua anggota kelompok untuk bekerja dengan sungguh-sungguh demi mencapai tujuan dengan kesungguhan hati, selaras dengan perencanaan dan upaya perorganisasian dari pimpinan. Artinya, keberhasilan pencapaian tujuan organisasi tergantung pada keseluruhan anggota kelompok dari semua tingkatan dalam organisasi. Ini mencerminkan konsep yang didefinisikan oleh Terry (dalam Sukarna 2011). Adapun cara-cara pengarahan tersebut sebagai berikut :

- a) Orientasi adalah metode arahan yang menyampaikan informasi yang digunakan agar suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif:
- b) Perintah adalah instruksi atau permintaan dari atasan kepada bawahannya untuk melakukan atau mengulang suatu tindakan tertentu dalam situasi tertentu.

4. Controlling (pengawasan)

Mengelola berbagai interaksi dan hubungan serta memantau kinerja tim agar sesuai dengan rencana dan Standar Prosedur Operasional sehingga output atau hasil pekerjaan sesuai dengan harapan. Di dalam fungsi pengendalian ini termasuk kegiatan untuk mengevaluasi, menyesuaikan, atau memperbaiki kesalahan atau deviasi yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan. Menurut Terry dalam (Susita et al., 2023) Pengawasan bisa dijelaskan sebagai langkah-langkah dalam menetapkan tujuan yang harus dicapai, seperti apa standar pelaksanaannya, mengevaluasi pelaksanaan, apabila dibutuhkan, melakukan perubahan agar pelaksanaannya sebanding dengan konsep atau standar yang sudah permanen. Mengenai tujuan dari pengendalian yaitu :

- a) Menilai kinerja serta pencapaian yang sudah diperoleh bagi para karyawan.
- b) Memeriksa pencapaian yang sudah terjadi serta standar yang telah disetujui sebelumnya.
- c) Melakukan koreksi terhadap ketidaksesuaian yang muncul berdasarkan akar penyebabnya, dan mengambil langkah-langkah ke depan berdasarkan

analisis faktor penyebab tersebut. Ini juga menggarisbawahi tentang praktik pengawasan yang efektif, yang mencakup :

- d) Mendirikan patokan atau landasan untuk melakukan pengawasan.
- e) Lakukan pengukuran terhadap pelaksanaan tersebut.
- f) Evaluasi pelaksanaan dengan membandingkannya dengan standar yang ditetapkan, dan identifikasi perbedaannya.

Ubahlah pemikiran dengan mengadopsi pendekatan tindakan yang tepat hingga tidak ada kesamaan dengan cara penyimpangan yang awalnya digunakan.

2.2.2 Pengembangan Pariwisata

Asal-usul istilah "Pariwisata" bersumber oleh bahasa Sansekerta, terdiri dari dua kata, "pari" yang mengandung makna berulang-ulang atau berkali-kali pergi dari satu tempat ke tempat lain, dan "tour" yang berarti melaksanakan darmawisata dari satu tempat ke tempat lain. (Chaerunissa & Yuniningsih, 2020). Suatu aktivitas atau darmawisata yang dilaksanakan untuk hiburan atau istirahat, serta segala perlengkapan yang diperlukan untuk kegiatan tersebut, merupakan definisi dari pariwisata. Seseorang dikatakan melakukan pariwisata jika mereka melaksanakan darmawisata sekiranya sepanjang 80 km dari tempat tinggal mereka dengan tujuan liburan

Pengembangan berbagai jenis pariwisata melibatkan banyak aspek dari berbagai sektor untuk merangsang pertumbuhan suatu wilayah dengan tujuan menarik minat wisatawan. Sementara itu, upaya pengembangan pariwisata merupakan langkah untuk memperbaiki atau meningkatkan objek pariwisata yang sudah ada agar makin memikat, baik dari segi lokasi serta fasilitas yang tersedia, dengan tujuan menarik minat para pengunjung. UU No. 13/ 2020 pariwisata didefinisikan sebagai berbagai jenis aktivitas darmawisata yang dibantu oleh bermacam akomodasi dan fasilitas yang diberikan bagi masyarakat setempat, pelaku usaha, pemerintah, dan pemda (Kemenparekraf, 2009). Pariwisata yang meningkat mempengaruhi banyak hal, seperti ekonomi, aspek sosial dan budaya, pemanfaatan sumber daya alam, pelestarian lingkungan hidup, keamanan dan pertahanan. Tujuan dari pengembangan pariwisata nasional, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 UU No. 10/ 2009 tentang kepariwisataan, yaitu untuk menambah peningkatan perekonomian, kesejahteraan masyarakat, mengurangi

tingkat kemiskinan, mengurangi pengangguran, menjaga kelestarian alam dan lingkungan serta sumber daya alam, menumbuhkan kebudayaan, meningkatkan citra negara, membentuk rasa cinta tanah air, memperkuat identitas serta persatuan nasional, serta memperkuat hubungan persahabatan antar bangsa.

Pada dasarnya, kebijakan pariwisata bertujuan untuk mencapai pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, baik dalam aspek ekonomi, sosial-budaya, maupun pelestarian sumber daya alam. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata harus dijalankan secara terintegrasi oleh semua pihak, dengan semua kelompok kepentingan memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Tanggung jawab pembangunan pariwisata meliputi pemerintah pusat, pemda, sektor swasta, serta masyarakat setempat (Sawir dan Pende, 2020). Industri perjalanan wisata diatur oleh tiga entitas, yaitu pihak berwenang publik, manajemen bisnis, dan penduduk lokal (Khlaikaew, 2015). Stakeholder dalam sektor pariwisata terdiri dari masyarakat, perusahaan swasta, dan pemerintah. Kerja sama yang baik antara para stakeholder ini perlu dikarenakan untuk membagikan dampak baik demi perkembangan pariwisata secara menyeluruh.

1. Prinsip Dasar Pengembangan Pariwisata

Salah satu tujuan pengembangan pariwisata adalah untuk menarik lebih banyak pengunjung ke suatu destinasi wisata, mendorong mereka agar menetap lebih lama, serta membelanjakan uang mereka pada area tersebut, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dari pengunjung dari luar negeri dan pendapatan lokal yang berasal dari wisatawan domestik. Demikian pula, pengembangan pariwisata juga memiliki tujuan untuk mempromosikan serta melestarikan kebudayaan di destinasi pariwisata tersebut, Berikut ini keuntungan pengembangan pariwisata menurut (Dwi Wismayanti, 2020) yaitu :

- a) Dalam konteks ekologi, pengembangan pariwisata harus memastikan pelestarian dan perlindungan terhadap demikian pula, aset alam yang menjadi pesona pariwisata, contohnya ekosistem laut, hutan, pantai, danau, serta sungai.
- b) Dalam konteks sosial dan budaya, perkembangan pariwisata diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat pada melestarikan gaya hidup, dengan menjaga sistem nilai yang membedakan identitas budaya masyarakat lokal.

- c) Dari segi ekonomi, pengembangan pariwisata harus membuka peluang kerja bagi seluruh individu agar ikut dalam kegiatan ekonomi, dengan membangun sistem ekonomi yang sehat dan kompetitif.
- d) Memajukan derajat hidup masyarakat sekitar dengan membagikan peluang kepada mereka untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan industri pariwisata.

Oleh karena itu, perkembangan pariwisata yang berkelanjutan memerlukan proses perancangan yang cermat yang memperhitungkan tiga aspek utama: industri pariwisata, keberlanjutan lingkungan (sumber daya alam), dan partisipasi warga setempat, dengan tujuan meningkatkan mutu hidup. Perkembangan pariwisata harus mempertimbangkan empat hal penting, termasuk analisis pasar, analisis teknis dan perencanaan, analisis sosio ekonomi, serta analisis aspek bisnis dan hukum.

2. Klasifikasi Jenis-Jenis Pariwisata

Berdasarkan Yoeti pada bukunya yang berjudul "Pengantar Ilmu Pariwisata" (1996), pariwisata dapat diklasifikasikan berdasarkan lokasi geografis, efeknya terhadap neraca pembayaran, motivasi atau tujuan perjalanan, durasi kunjungan, dan atraksi wisata yang dikunjungi. Orang melakukan perjalanan dengan berbagai tujuan dan keinginan yang beragam. Selain itu, untuk perencanaan dan pengembangan pariwisata, penting untuk membedakan antara berbagai jenis pariwisata, sehingga jenis dan bentuk pariwisata yang dikembangkan sesuai dengan harapan. Klasifikasi macam-macam pariwisata tersebut yaitu :

- 1). Menurut lokasi geografis di mana pariwisata berkembang.

Klasifikasi pariwisata berdasarkan lokasi geografis dapat memuat berbagai jenis, seperti :

- a. Pariwisata daerah (*regional tourism*) merujuk pada jenis kepariwisataan yang terfokus dan terbatas pada area tertentu. Contohnya adalah pariwisata di Denpasar atau Bandung. Pariwisata wilayah (*regional tourism*) yaitu aktivitas pariwisata yang berkembang pada wilayah spesifik, baik itu di tingkat nasional bahkan internasional. Contohnya adalah pariwisata di Bali, Yogyakarta, dan daerah lainnya.

- b. Pariwisata nasional (national tourism) yaitu bentuk pariwisata yang berfokus di pada suatu negara, melibatkan wisatawan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sebagai contoh, pariwisata di berbagai wilayah di Indonesia. Pariwisata regional-internasional mengacu pada kegiatan pariwisata yang tumbuh di wilayah internasional yang melibatkan lebih dari satu negara. Sebagai contoh, pariwisata di wilayah ASEAN. Pariwisata internasional (international tourism) adalah jenis pariwisata yang ada atau berkembang di berbagai negara di seluruh dunia.

2). Menurut tujuan atau maksud dari perjalanan.

Berdasarkan maksud atau tujuan dari perjalanan, berbagai jenis pariwisata dibedakan menjadi kategori yang berbeda :

- a. Pariwisata bisnis merujuk pada jenis kepariwisataan di mana pengunjung melakukan perjalanan untuk tujuan bisnis, seperti kunjungan dinas, kegiatan komersial, seminar, dan kegiatan sejenis.
- b. Pariwisata liburan adalah jenis kepariwisataan yang melibatkan orang-orang yang melakukan perjalanan untuk liburan, cuti, dan kegiatan sejenis. Wisata pendidikan yaitu bentuk kepariwisataan di mana pengunjung melaksanakan perjalanan agar tujuan pembelajaran atau studi, misalnya dalam bentuk studi wisata.
- c. Perjalanan familiarisasi adalah perjalanan yang bertujuan untuk lebih memahami bidang atau daerah yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang.
- d. Perjalanan ilmiah yaitu perjalanan wisata yang utamanya bertujuan untuk memperoleh pengetahuan atau melakukan penelitian di bidang ilmu pengetahuan.
- e. Perjalanan Misi Khusus adalah perjalanan wisata yang dilakukan untuk tujuan tertentu, seperti misi seni, olahraga, atau misi lainnya.
- f. Pariwisata Berburu adalah perjalanan wisata yang bertujuan demi melakukan pengejaran binatang yang diizinkan oleh pengelola setempat sebagai hiburan sesaat.

3). Berdasarkan waktu atau saat kunjungan.

Berdasarkan waktu atau saat kunjungan, terdapat dua jenis pariwisata antara lain:

1. Pariwisata musiman merujuk pada jenis pariwisata yang terjadi di saat-saat tertentu dalam setahun. Contohnya mencakup pariwisata selama musim panas, musim dingin, dan lain sebagainya.
2. Pariwisata insidental adalah bentuk perjalanan wisata yang terjadi karena kejadian khusus atau acara tertentu. Sebagai contoh, partisipasi dalam acara Sekaten di Yogyakarta, perayaan Nyepi di Bali, dan sejenisnya.

Tipe-tipe pariwisata tersebut dapat bertambah, bergantung pada kondisi serta perkembangan industri pariwisata di suatu daerah. Ini terhubung dengan inovasi yang dilakukan oleh para profesional terampil yang terlibat dalam industri pariwisata. Semakin banyak gagasan kreatif dan beragam yang dimiliki, semakin banyak variasi dan jenis wisata yang dapat ditemukan untuk memperkaya industri pariwisata.

2.2.3 Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*) yaitu model pariwisata yang meningkat cepat, seperti peningkatan kapabilitas akomodasi, komunitas lokal, serta pengaruh terhadap lingkungan. Dalam mengembangkannya, investasi baru dalam sektor pariwisata harus dilakukan tanpa menimbulkan dampak negatif serta harus berintegrasi bersama lingkungan sekitarnya. Ini dapat dicapai dengan memperbesar manfaat positif dan membatasi dampak negatif dari kegiatan pariwisata. (Rahmat, 2021).

Selain itu, pariwisata berkelanjutan juga mencerminkan fenomena di mana industri pariwisata menjumpai perkembangan yang cepat, diantaranya pertumbuhan kapasitas akomodasi dan populasi lokal di destinasi wisata. Pengembangan destinasi pariwisata dan investasi baru harus dijalankan tanpa menimbulkan dampak negatif pada industri pariwisata dan harus terintegrasi secara harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Dengan begitu, potensi dampak negatif dapat diminimalisir sementara manfaat positifnya dapat dioptimalkan (Evita, Sirtha dan Sunarta, 2012). Konsep pembangunan berkelanjutan muncul ketika proses pembangunan mengalami kegagalan, seringkali karena adanya pendekatan

dominan top-down (dari atas ke bawah) yang menghasilkan arus informasi yang satu arah. Dampak ketidak berkelanjutan dari proses pembangunan dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi (Sunarta dan Arida, 2017).

Pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan telah mengalami perubahan dari yang sebelumnya diatur dalam Permenpar No. 14/2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, menjadi Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No. 9/2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata. Tindakan ini bertujuan untuk memperkuat praktik tradisional serta kearifan lokal dari masyarakat yang memiliki beragam budaya dalam pengelolaan daya tarik lingkungan alam dan kebudayaan, sekaligus melakukan penyesuaian dengan standar internasional. Pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan yang disampaikan dalam Permen ini menjadi referensi oleh Pemerintah Pusat, Pemda, dan pihak lainnya dalam usaha pembangunan destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Tambahan itu, menurut World Tourism Organization dan United Nations Environment Program (2005), telah diidentifikasi minimal 12 tujuan utama dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, termasuk di antaranya:

1. *Economic Viability*, memastikan bahwa destinasi pariwisata tetap berkelanjutan dan kompetitif, sehingga dapat memperoleh kegunaan ekonomi waktu lama.
2. *Local Prosperity*, optimalkan andil pariwisata dalam ekonomi masyarakat sekitar lokasi pariwisata tersebut.
3. *Employment Quality*, menambah kapasitas tenaga kerja yang terlibat dalam industri pariwisata, termasuk pemerataan upah, kesetaraan gender, dan inklusi rasial.
4. *Social Equity*, menyebarkan manfaat ekonomi dan sosial secara merata dan adil, serta menaikkan peluang partisipasi, pendapatan, dan pelayanan.
5. *Visitor Fulfillment*, akan membagikan pengetahuan menyenangkan bagi pengunjung, termasuk dalam konteks berbagi pengetahuan selama kegiatan wisata.

6. *Local Control*, melibatkan dan memberdayakan penduduk setempat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait manajemen serta perkembangan pariwisata.
7. *Community Wellbeing*, mempertahankan serta menguatkan standar hidup penduduk lokal, termasuk struktur sosial, akses terhadap sumber daya, fasilitas, serta infrastruktur penyokong kehidupan.
8. *Biological Diversity*, membantu berbagai jenis pelestarian lingkungan alam, habitat, dan keanekaragaman hayati.
9. *Resource Efficiency*, mengurangi pemakaian sumber daya langka dan tak dapat diperbaharui selama proses pengembangan dan pengelolaan fasilitas pariwisata.
10. *Environmental Purity*, mengurangi dampak polusi udara, air, dan tanah, dan mengurangi produksi sampah oleh destinasi pariwisata serta pengunjungnya.

Pada Permenpar No. 14/2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang telah digantikan oleh Permenpar dan Ekraf No. 9/2021 mengenai Pedoman Destinasi Pariwisata, mempunyai empat elemen kunci dalam usaha peningkatan pariwisata (Kemenparekraf, 2021). Kriteria ini pula yang menjadi standar ditetapkan oleh *Global Sustainable Tourism Council* (GSTC), yang meliputi:

1. Manajemen destinasi pariwisata yang berkelanjutan (*Sustainability Management*)
2. Penggunaan ekonomi untuk penduduk setempat (*Social-Economy*)
3. Pemeliharaan kebudayaan bagi penduduk setempat dan pengunjung (*Culture*)
4. Konservasi lingkungan (*Environment*)

Keempat asas tersebut dijelaskan secara rinci dalam undang-undang pariwisata negara. Mengevaluasi kinerja pembangunan sektor pariwisata tidak hanya berfokus pada dampaknya atas pertumbuhan ekonomi, namun juga berfokus kepada kenaikan kemakmuran masyarakat, penurunan angka pengangguran dan kekurangan, serta menjaga pembangunan industri pariwisata, lingkungan hidup dan

sumber daya alam, promosi kebudayaan, serta peningkatan citra dan identitas bangsa, dengan tujuan memperkuat persatuan.

2.2.4 **Environmental Sustainability**

Penggunaan kata “lingkungan” cenderung dikaitkan dengan beberapa jenis dampak manusia terhadap sistem alam. Menurut (Haryanto, 2014) kelestarian lingkungan hidup (*environmental sustainability*) dapat didefinisikan sebagai kondisi keseimbangan, ketahanan, dan keterhubungan yang memungkinkan masyarakat manusia untuk melakukannya memenuhi kebutuhannya tanpa melebihi kapasitas ekosistem yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tanpa merusak atau mengurangi keanekaragaman hayati Lingkungan hidup, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 32/2009 atas UUPPLH, mengacu pada kepaduan ruang yang meliputi seluruh unsur, kondisi, organisme, salah satunya manusia serta kepribadian, yang berinteraksi dengan alam, memastikan kelangsungan hidup, serta kemakmuran manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain UUPPLH, para ahli juga mengemukakan definisi lingkungan hidup. Berdasarkan Emil Salim, lingkungan hidup mencakup semua elemen, kondisi, dan pengaruh yang hadir di lingkungan tempat manusia berdiam, yang berdampak pada kehidupan, termasuk kelangsungan hidup manusia (Ligar, 2015).

Berkelanjutan memiliki makna yang sangat luas, merujuk pada kemampuan untuk menjalankan sesuatu tanpa ada pembatasan waktu yang spesifik. Konsep berkelanjutan mencakup ketahanan, keseimbangan, dan interkoneksi. Secara lebih mendetail, berkelanjutan dapat diinterpretasikan sebagai kemampuan untuk terus melakukan suatu tindakan atau perilaku tanpa ada batasan waktu yang ditentukan. Menurut World Commission on Environment and Development, keberlanjutan diartikan sebagai keahlian untuk mengisi kepentingan saat ini tanpa mempertaruhkan keahlian angkatan mendatang dalam mencukupi keperluan mereka sendiri (Rona et al., 2022). Lingkungan berkelanjutan mengacu pada semua elemen yang mengelilingi makhluk hidup dan memengaruhi kehidupannya dengan terus dipelihara, baik secara alami maupun melalui intervensi manusia, tanpa ada pembatasan waktu. Kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dapat dijelaskan sebagai kondisi di mana terdapat kesepadan, kekuatan, dan keterhubungan yang

memperbolehkan manusia dalam dalam mencukupi kebutuhan mereka tanpa melebihi daya dukungan ekosistem, dan memiliki kemampuan regenerasi untuk terus memenuhi kebutuhan tersebut di masa depan.

1. Prinsip Lingkungan Berkelanjutan

Prinsip-prinsip lingkungan berkelanjutan menekankan pada kelestarian dalam beberapa aspek, termasuk:

1. Menjaga sistem-sistem yang mendukung kehidupan.
2. Mempertahankan serta menambah keragaman hayati.
3. Mempertahankan maupun memajukan kesatuan ekosistem, dan mengembangkan serta menerapkan tindakan rehabilitasi untuk ekosistem yang mengalami kerusakan parah.
4. Melaksanakan rencana tindakan yang bersifat pencegahan dan adaptif dalam menghadapi tantangan transformasi lingkungan global.

Pada ruang ekologis, Herman Daly (1990) dalam jurnal (Effendi et al., 2018) yang salah satu perintis keberlanjutan ekologis menyarankan untuk :

1. Tingkat pemanenan sumber daya terbarukan harus seimbang dengan tingkat regenerasinya agar dapat dipertahankan secara berkelanjutan.
2. Volume limbah yang dihasilkan oleh suatu proyek tidak boleh melebihi kapasitas lingkungan untuk menyerapnya secara berkelanjutan.
3. Penurunan jumlah sumber daya tak terbarukan harus diiringi dengan pengembangan alternatif yang dapat diperbaharui sejalan dengan penurunan sumber daya yang tersedia.

Dalam upaya menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, prinsip utamanya terletak pada konsep ekologi, di mana setiap elemen ekologis, mulai dari yang terkecil, harus diperhatikan dengan cermat. Tujuan dari penciptaan lingkungan berkelanjutan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh, dimulai dari sekarang maupun dimasa yang akan datang, dengan memperhitungkan tidak hanya aspek ekologis, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi. Ketiga dimensi ini, yaitu ekologi, sosial, dan ekonomi, harus

diintegrasikan secara seimbang guna mewujudkan tujuan lingkungan berkelanjutan.

Berdasarkan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 18 UUPPLH, konservasi sumber daya alam bermaksud untuk memastikan penggunaan yang bijaksana dan kelangsungan ketersediaannya sambil tetap menjaga dan meningkatkan nilai serta keragaman kualitasnya. Pasal 1 angka 2 UU No. 5/1990 tentang Pelestarian Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (UUKH) juga menggambarkan konservasi sumber daya alam hayati sebagai upaya manajemen dengan bijaksana untuk menjamin kelangsungan persediaannya sambil tetap merawat dan meningkatkan kualitas serta keragaman nilainya.

2. Tujuan Pelestarian Lingkungan

Prinsip perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sejalan bersamaan prinsip kelestarian lingkungan hidup. Dalam konteks ini, Koesnadi Hardjasoemantri menjelaskan bahwa prinsip kelestarian lingkungan hidup yang tepat dan seimbang harus dikaitkan dan dijelaskan dengan kemampuan menjaga lingkungan. Perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya erat kaitannya dengan terlaksana tiga tujuan pelestarian, ialah:

- a. Memastikan berlanjutnya prosedur ekologis bagi mendukung struktur dasar kehidupan sebagai dasar bagi ekspansi dan kesejahteraan manusia (perlindungan struktur dasar kehidupan);
- b. Menjamin keanekaragaman genetik dan kelangsungan berbagai ekosistem untuk mendukung pembangunan, pengetahuan dan teknologi yang berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan manusia akan kesejahteraan dengan menggunakan sumber daya alam hayati (melindungi sumber daya plasma nutfah);
- c. Mengatur penggunaan sumber daya alam hayati untuk menjamin keberlangsungan keberadaannya (pengelolaan berkelanjutan).